



Anggota DPRD Singkawang Sharing ke DPRD Landak

LANDAK, TRIBUN - Sebanyak 10 orang perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Singkawang, Kalimantan Barat, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Landak pada Rabu (26/6).

Kedatangan perwakilan anggota DPRD Kota Singkawang ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Landak, Heri Saman bersama anggota yakni Evi Juvenalis, Lamri, Anjiu, Mohzai, Sabirin dan Cahya Tanus.

Kedatangan anggota DPRD Singkawang ini, bertujuan untuk sharing dan Konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Singkawang. Mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018.

"Kunjungan studi pembelajaran dari anggota DPRD Kota Singkawang ke DPRD Kabupaten Landak ini mendapat hasil yang positif. Di mana kalau kita melihat di DPRD Kota Singkawang itu belum mempergunakan tenaga ahli," ujar Eka Candra selaku anggota Banggar DPRD Kota Singkawang.

Menurut Eka, DPRD Kabupaten Landak ini sangat luar biasa. "Saya rasa kemajuannya dan gak salah juga Kabupaten Landak ini sudah enam kali memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tapi kalau kita di Kota Singkawang baru dua kali," jelasnya.

Sehingga dari hasil pembelajaran DPRD Kota Singkawang ke DPRD Kabupaten Landak ini akan menjadi perbandingan untuk



TRIBUN/ALF

SHARING - Anggota DPRD Kota Singkawang berfoto bersama usai melakukan sharing saat hadir di DPRD Kabupaten Landak, Rabu (26/6).

DPRD Kota Singkawang. Dimana sebelum Wali kota Singkawang dipimpin oleh Tjhai Chui Mie, dua Tahun sebelumnya belum pernah mendapat WTP.

"Nah, dengan dipimpin oleh ibu Tjhai Chui Mie ini. Alhamdulillah Singkawang dua kali mendapat WTP walau pun terdapat sedikit catatan. Makanya Landak sudah mendapat enam kali WTP, ini kita melirik sedikit, apa si trik yang dipakai Kabupaten Landak ini sehingga capaiannya sangat bagus," ucapnya.

Kemudian dengan hasil sharing di DPRD Kabupaten Landak ini, Eka menanggapinya bahwa ini suatu wawasan yang sangat luar biasa bagi anggota DPRD Kota Singkawang. "Sehingga dapat pembelajaran yang baru," tutupnya.

Sementara itu Ketua DPRD Landak Heri Saman menuturkan, di DPRD Landak dalam membahas APBD dengan Pansus setelah ada laporan pertanggungjawaban APBD oleh Bupati kepada fraksi-fraksi.

"Kalau di Singkawang

membahasnya oleh badan anggaran. Kalau kami di sini karena ini merupakan satu pelaksanaan dan merupakan fungsi pengawasan menyeluruh dari pada alat-alat kelengkapan mau pun fraksi. Jadi kami membentuk satu alat kelengkapan yakni membentuk pansus terdiri dari fraksi-fraksi," ungkapny.

Lanjut Heri Saman, karena ini sesuatu hal sangat penting makanya dibentuk pansus untuk membahasnya. "Seperti biasa, sesudah pertanggungjawaban, ini untuk kita masuk membahas laporan realisasi semester pertama," bebernya.

Kemudian nanti masuk pembahasan ke APBD perubahah. "Jadi bahan kita untuk membahas APBD perubahan, salah satunya dari pertanggungjawaban ini, dalam arti perhitungan," katanya.

Sehingga dapat diketahui berapa silva yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada BPK dalam hal LKPD. "Sehingga LKPD sudah disampaikan, dan kita terima LHP dari BPK," pungkasnya. (alf)